



Pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya

Bima Sakti Anggoro Putra¹, Hero Priono²

^{1,2}Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur

¹bimaputra3005@gmail.com, ²heropriono1161@gmail.com

Info Artikel

Sejarah artikel:

Diterima 5 April 2022

Disetujui 9 Juni 2022

Diterbitkan 25 Juni 2022

Kata kunci:

Sistem pengendalian internal; Sistem informasi akuntansi; Pemanfaatan teknologi informasi; Akuntabilitas; Pengelolaan dana kelurahan

Keywords :

Internal control system; Accounting information system; Utilization of information technology; Accountability; Village fund management

ABSTRAK

Data ICW menyebutkan bahwa kepala desa cukup sering terjerat tindak pidana korupsi pada tahun 2016 hingga 2017 terdapat 110 kepala desa dan pada tahun 2018 terdapat 102 tersangka. Sedangkan untuk permasalahan internal Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yaitu kurangnya pertanggungjawaban kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemerintah kelurahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Akibatnya, pemerintah kelurahan terlalu mengandalkan *outsourcing* dalam penggunaan sistem informasi akutansinya. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Objek dalam penelitian ini adalah 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan jumlah pegawai yang dapat dijadikan sebagai responden sebanyak 30 pegawai. Teknik analisis untuk penelitian ini menggunakan alat smart *Partial Least Square* (PLS) 3.0. Berdasarkan analisis data, didapatkan hasil bahwa sistem pengendalian internal dan sistem informasi akuntansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sedangkan pemanfaatan teknologi informasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

ABSTRACT

ICW data states that village heads are quite often entangled in corruption crimes, in 2016 to 2017 there were 110 village heads and in 2018 there were 102 suspects. As for the internal problems of the Gubeng District, Surabaya City, namely the lack of performance accountability caused by lack of knowledge of the sub-district government in using accounting information systems. As a result, the sub-district government relies too much on *outsourcing* in the use of its accounting information system. This study aims to obtain empirical evidence of the effect of internal control systems, accounting information systems, and the use of information technology on the accountability of village fund management. The objects in this study are 6 (six) Kelurahan in Gubeng Subdistrict, Surabaya City with several employees who can be used as respondents as many as 30 employees. The analysis technique for this research uses a smart *Partial Least Square* (PLS) 3.0 tool. Based on data analysis, it was found that the internal control system and accounting information system had a statistically positive and significant effect on the accountability of village fund management, while the use of information technology had no statistically significant effect on the accountability of village fund management.



©2022 Penulis. Diterbitkan oleh Program Studi Akuntansi, Institut Koperasi Indonesia.

Ini adalah artikel akses terbuka di bawah lisensi CC BY

(<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

PENDAHULUAN

Akhir tahun ini 2022, perhatian yang dituangkan pada kelurahan di Indonesia telah meningkat. Hal ini dikarenakan adanya Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menetapkan tambahan Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp3 triliun pada 8.212 Desa di Indonesia di 410 provinsi dan kota dalam APBN 2019. Sehingga, Hal ini memungkinkan setiap kelurahan untuk mengelola dana desa secara mandiri dan meningkatkan potensi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kelurahan menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 1 Angka 2 menyatakan bahwa Kelurahan merupakan bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan. Kelurahan dipimpin Lurah dan dibentuk oleh Perda Kabupaten/Kota yang biasa disebut dengan Lurah. Lurah diangkat oleh Walikota atas rekomendasi sekretaris daerah oleh anggota PNS dan kemudian bertanggung jawab atas Camat.

Menurut Permendagri Nomor 130 Tahun 2018, Pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan menggunakan dana Kelurahan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota setempat. Anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan akan dilaksanakan menurut Peraturan Pemerintahan Nomor 17 Tahun 2018 melibatkan kelompok masyarakat dan/atau organisasi kemasyarakatan, dimana Lurah sebagai kuasa pengguna anggaran juga menunjuk pejabat penatausahaan keuangan. Pengalokasian dana Kelurahan berbeda antara daerah kota yang memiliki desa dengan yang tidak memiliki desa. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 yang menyebutkan didaerah kota yang tidak mempunyai desa, alokasi anggaran paling sedikit 5% (lima persen) dari APBD setelah dikurangi dana alokasi khusus sedangkan, untuk daerah kabupaten yang memiliki Kelurahan dan Kota yang memiliki desa, alokasi anggaran Kelurahan paling sedikit sebesar dana desa terendah yang diterima oleh desa di Kabupaten/Kota.

Pemerintah Kelurahan harus dapat menerapkan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan keuangan Kelurahan, dan segala kegiatan administrasi pemerintahan Kelurahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Halim (2007) (dalam Martini et al., 2019) Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengelolaan, pertanggungjawaban, dan pengawasan, melaporkan kepada masyarakat dan camat tentang kegagalan atau kesuksesan sebagai evaluasi untuk tahun berikutnya. Fenomena atau permasalahan yang melingkupi akuntabilitas dinyatakan oleh Indonesia Corruption Watch (ICW) dimana, terdapat Kontroversi tentang pendanaan desa konseptual, yang akhir-akhir ini menjadi bahan perdebatan publik, dan meningkatnya kapasitas kepala desa dalam mengelola anggaran untuk menghasilkan laporan pertanggungjawaban. Hal ini berbeda dengan data ICW yang menunjukkan bahwa walikota sering terlibat dalam tindak pidana korupsi. Dari 2016 hingga 2017 ada 110 kepala desa dan pada 2018 ada 102 tersangka. Permasalahan yang terjadi pada internal Kecamatan Gubeng Kota Surabaya yaitu kurangnya pertanggungjawaban kinerja yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan pemerintah kelurahan dalam menggunakan sistem informasi akuntansi. Akibatnya, pemerintah kelurahan terlalu mengandalkan outsourcing dalam penggunaan sistem informasi akutansinya. Pemerintah pusat ingin agar pemerintah daerah melakukan upaya lebih lanjut untuk memantau dana kelurahan dan mengontrol secara ketat saluran distribusi dana tersebut, mulai dari anggaran hingga upaya distribusi, akuntabilitas, dan transparansi. Upaya bagi modal untuk mengelola dana kelurahan. Pemerintah pusat berharap agar pemerintah daerah melakukan upaya lebih lanjut untuk memantau dana kelurahan dan mengontrol ketat saluran distribusi dana tersebut, mulai dari anggaran hingga upaya distribusi, akuntabilitas, dan transparansi. Upaya bagi modal untuk mengelola dana kelurahan.

Menurut PP No. 60 Tahun 2008 mengenai Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pasal 2 memberikan pernyataan, Bupati/Walikota harus mengendalikan pengelolaan kegiatan pemerintahan guna mewujudkan pengelolaan keuangan pemerintah yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Salah satu tujuan yang dicapai dengan pengenalan sistem pengendalian internal adalah untuk memberikan jaminan yang wajar tentang keandalan akuntansi pemerintah. Sistem pengendalian intern harus sesuai prosedur rekonsiliasi antara data transaksi keuangan yang di akutansikan oleh Pengguna Anggaran menggunakan data transaksi keuangan yang diakutansikan Bendahara Umum Negara/Daerah (PP No.8 tahun 2006). Sistem Pengendalian Internal dibutuhkan untuk meminimalkan adanya kecurangan dalam suatu sistem. Hal ini selaras dengan penelitian Halim (2004) (dalam Martini et al., 2019) yang menyatakan bahwa untuk mendukung akuntabilitas dibutuhkan adanya sistem pengendalian intern dan sistem pengendalian ekstern yang baik serta dapat dipertanggungjawabkan. Sehingga, corporate governance tidak akan berjalan efektif tanpa adanya pengendalian internal yang baik.

Menurut Baridwan (2009) (dalam Wahyuni et al., 2018) Sistem Informasi Akuntansi adalah suatu komponen organisasi yang mengumpulkan, menggolongkan, menghasilkan dan mengkomunikasikan informasi keuangan yang relevan untuk mengambil keputusan kepada pihak-pihak luar (seperti inspeksi pajak, investor dan kreditor) dan pihak-pihak dalam (terutama manajemen). Suatu organisasi sektor publik dalam mengelola dana masyarakat dituntut harus mampu memberikan laporan keuangan yang bisa dipertanggungjawabkan. Kepala kelurahan menjadi penanggungjawab pengelolaan keuangan dan asset kelurahan. PP No 56 tahun 2005 pasal 9 memberikan pernyataan pemerintah

menyelenggarakan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis) secara nasional bertujuan merumuskan kebijakan dan pengendalian perpajakan nasional, menyajikan informasi keuangan daerah secara nasional, merumuskan kebijakan keuangan daerah, dan melakukan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pendanaan desentralisasi, dekonsentrasi, tugas pembantuan pinjaman daerah dan defisit anggaran daerah. Oleh karena itu, adanya SIKD yakni diwajibkannya pelaporan bagi masing-masing daerah perlu diiringi dengan akuntabilitas di dalamnya agar informasi yang ada dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan teknologi informasi memberikan kemudahan bagi pegawai dengan menghemat waktu dan tenaga. Pemanfaatan teknologi juga dimanfaatkan aparat kelurahan di tingkat pemerintahan kelurahan dalam pengelolaan data dan menyimpan informasi. Teknologi informasi dapat juga digunakan sebagai media untuk mengurangi terjadinya kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja (Rahadi, 2017). Pemerintah berhak untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah kelurahan atas pemerintahan dan pengelolaan keuangan kelurahan. Oleh karena itu, pemerintah kelurahan harus menyusun laporan sesuai dengan aturan dan tidak mengandung unsur-unsur yang membingungkan pengguna laporan keuangan tersebut. Laporan keuangan yang disusun oleh pemerintah kelurahan akan disampaikan kepada pemerintah sebagai bahan evaluasi di kemudian hari. Teknologi informasi membuat pelaporan keuangan lebih kredibel dan relevan. Teknologi informasi memudahkan integrasi laporan dari pemerintah kelurahan ke pemerintah. Teknologi informasi juga dapat digunakan untuk meminimalisir keterlambatan pelaporan kinerja pengelolaan dan kelurahan. Penggunaan teknologi informasi menjadikan informasi yang diperoleh lebih tepat dan efektif dalam penyebaran informasi dapat juga meminimalisir kecurangan dalam alokasi dana kelurahan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : 1) Pengaruh Sistem Pengendalian Internal terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, 2) Pengaruh Sistem Informasi Akuntansi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya, 3) Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi terhadap akuntabilitas pemerintah Kelurahan dalam mengelola dana Kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya.

Penelitian yang dilakukan Rezkianti (2019) bahwa pengaruh Sistem Pengendalian Internal, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Kompetensi Perangkat Desa berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan Lestari & Dewi (2020) bahwa Pemahaman Akuntansi berpengaruh, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Penelitian yang dilakukan Pahlawan et al. (2020) bahwa Kompetensi Aparatur Desa dan Partisipasi Masyarakat berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, Sedangkan Sistem Pengendalian Internal dan Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

Penelitian yang dilakukan Indraswari & Rahayu (2021) bahwa Kompetensi Pemerintah Desa dan Partisipasi Masyarakat tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa, sedangkan untuk Pemanfaatan Teknologi Informasi berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Penelitian yang dilakukan Sari & Zefri (2019) bahwa akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan Kecamatan Langkapura. Menurut Penelitian yang dilakukan Musdalifah (2020) bahwa Peran Perangkat desa, Aksesibilitas Laporan Keuangan berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Sedangkan Sistem Akuntansi Keuangan Desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif menurut Sugiyono (2015), Penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan fakta dan karakteristik tentang populasi atau wilayah tertentu secara sistematis dan akurat.

Populasi penelitian ini adalah pegawai yang bekerja di 6 kelurahan yang beranggotakan lurah, sekertaris, bendahara, dan pptk sebanyak 30 orang. Penelitian ini menggunakan teknik sampel jenuh dan populasi digunakan sebagai sampel yaitu 5 orang pada setiap kelurahan yang berjumlah 30 orang dari 6 kelurahan.

Teknik analisis untuk penelitian ini menggunakan alat Smart Partial Least Square (PLS) 3.0. Kelebihan alat ini dapat digunakan dengan ukuran sampel yang kecil, tidak memerlukan data berdistribusi normal, dan cocok untuk penelitian dengan sedikit dukungan teoritis. PLS juga bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antara konfigurasi untuk menentukan apakah mereka memiliki efek. Menurut Abdillah & Hartono (2015), metode analisis PLSSEM terdiri dari dua model yaitu model eksternal atau model pengukuran dan model internal atau model struktural.

1. Outer Model merupakan bagian dari model SEM untuk mengukur validasi dan hubungan antar konstruk dengan indikator-indikatornya dan juga reliabilitas instrument. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur suatu konsep ataupun mengukur tingkat konsistensi pada responden dalam menjawab item pertanyaan pada kuesioner (Abdillah & Hartono, 2015). Pengujian dalam Outer Model terdiri *Convergent Validity* (Validitas Konvergen), *Discriminant Validity* (Validitas Diskriminan), dan *Composite Reliability*.
2. *Inner Model* adalah model pengukuran yang menggambarkan hubungan antar komponen. Penggunaan model struktural dalam PLS dievaluasi oleh R² dari struktur dependen dan faktor nilai t dari setiap jalur untuk menguji signifikansi antar struktur. Nilai R² digunakan untuk mengukur derajat variasi perubahan variabel independen relatif terhadap variabel dependen. Nilai R² yang tinggi berarti model prediksi semakin baik (Abdillah & Hartono, 2015).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1 Deskripsi Responden

Kriteria	Keterangan	Jumlah	Responden	Persentase
Jenis Kelamin	Laki – Laki	16	30	53,33
	Perempuan	14		46,67
Pendidikan	SMP / Sederajat	1	30	3,33
	SMA / Sederajat	3		10,00
	Diploma I / II / III	1		3,33
	S1 / Sarjana	17		56,67
	S2 / Magister	8		26,67
Lama Menjabat	Kurang dari 5 tahun	22	30	73,33
	5 - 10 tahun	5		16,67
	Lebih dari 10 tahun	3		10,00

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan jenis kelamin menunjukkan bahwa responden dengan jenis kelamin laki - laki sebanyak 16 responden dengan persentase sebesar 53,33% dan responden dengan jenis kelamin perempuan sebanyak 14 responden dengan persentase sebesar 46,67%. Berdasarkan pendidikan menunjukkan bahwa responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMP / Sederajat sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 3,33%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir SMA / Sederajat sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 10%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir Diploma I / II / III sebanyak 1 responden dengan persentase sebesar 3,33%, responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 / Sarjana sebanyak 17 responden dengan persentase sebesar 56,67%, dan responden dengan tingkat pendidikan terakhir S1 / Sarjana sebanyak 8 responden dengan persentase sebesar 26,67%. Jumlah responden berdasarkan lama menjabat menunjukkan bahwa responden dengan lama menjabat selama kurang dari 5 tahun sebanyak 22 responden dengan persentase sebesar 73,33%, responden dengan lama menjabat selama 5 - 10 tahun sebanyak 5 responden dengan persentase sebesar 16,67%, dan responden dengan lama menjabat selama lebih dari 10 tahun sebanyak 3 responden dengan persentase sebesar 10%.

Deskripsi hasil kuesioner dalam penelitian ini terdiri dari tanggapan responden mengenai variabel penelitian. Teknik skoring dilakukan menggunakan 5 Kriteria yang dimodifikasi dari *Three Box Method* (Ferdinand, 2011) dengan perhitungan sebagai berikut :

1. Skor Tertinggi : Skor 5 (Sangat Setuju) × total responden (30 responden) = 150
2. Skor Terendah : Skor 1 (Sangat Tidak Setuju) × total responden (30 responden) = 30
3. Range : 150 – 30 = 120

4. Interval : $120 / 5 = 24$

Angka indeks yang dihasilkan berawal dari 30 hingga 150 dengan rentang sebesar 120, tanpa angka 0. Dengan menggunakan 5 kriteria, maka rentang sebesar 120 dibagi 5 akan menghasilkan rentang sebesar 24 yang akan digunakan sebagai dasar interpretasi nilai skor atau indeks yaitu :

1. Nilai Skor 30 – 54 = Sangat Rendah
2. Nilai Skor 54,01 – 78 = Rendah
3. Nilai Skor 78,01 – 102 = Sedang
4. Nilai Skor 102,01 – 126 = Tinggi
5. Nilai Skor 126,01 – 150 = Sangat Tinggi

Tabel 2 Tanggapan Responden mengenai Variabel Penelitian

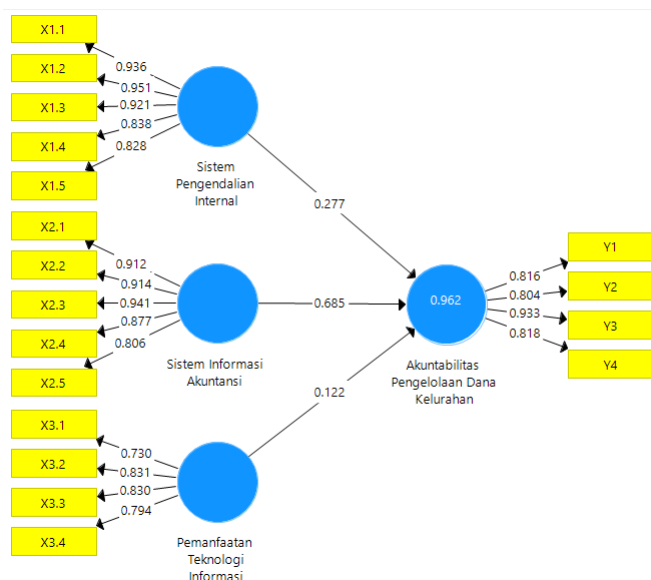
No	Variabel	Item	ST S (1)	T S (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Resp .	Total Skor	Interpretasi
1	Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0	0	2	9	19	30	137	Sangat Tinggi
2		X1.2	0	0	2	12	16	30	134	Sangat Tinggi
3		X1.3	0	0	2	8	20	30	138	Sangat Tinggi
4		X1.4	0	0	1	5	24	30	143	Sangat Tinggi
5		X1.5	0	0	1	12	17	30	136	Sangat Tinggi
Rata – Rata									137,6	Sangat Tinggi
1	Sistem Informasi Akuntansi	X2.1	0	0	2	8	20	30	138	Sangat Tinggi
2		X2.2	0	0	2	12	16	30	134	Sangat Tinggi
3		X2.3	0	0	2	10	18	30	136	Sangat Tinggi
4		X2.4	0	0	1	7	22	30	141	Sangat Tinggi
5		X2.5	0	0	1	10	19	30	138	Sangat Tinggi
Rata – Rata									137,4	Sangat Tinggi
1	Pemanfaatan Teknologi Informasi	X3.1	1	0	8	13	8	30	117	Tinggi
2		X3.2	1	1	4	15	9	30	120	Tinggi
3		X3.3	1	0	4	11	14	30	127	Sangat Tinggi
4		X3.4	0	0	3	10	17	30	134	Sangat Tinggi
Rata – Rata									124,5	Tinggi
No	Variabel	Item	ST S (1)	T S (2)	N (3)	S (4)	SS (5)	Resp .	Total Skor	Interpretasi
1	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	Y1	0	1	1	10	18	30	135	Sangat Tinggi
2		Y2	0	0	2	9	19	30	137	Sangat Tinggi
3		Y3	0	0	2	12	16	30	134	Sangat Tinggi
4		Y4	0	1	4	10	15	30	129	Sangat Tinggi
Rata – Rata									133,75	Sangat Tinggi

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan hasil kuesioner responden pada tabel 2 menunjukkan bahwa rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel sistem pengendalian internal. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel sistem informasi akuntansi. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan pengumpulan data, pemrosesan data, pengendalian dan pengamanan data, manajemen data, dan pengadaan informasi.

Rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atau cenderung setuju

dengan pengelolaan dan penyimpanan data keuangan; pengolahan informasi dengan jaringan internet; serta perawatan dan pemeliharaan. Rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Yang artinya, rata-rata pekerja cenderung memberikan penilaian yang sangat tinggi atau tersedia untuk warga secara tertulis dan sangat setuju dengan proses pengambilan keputusan sesuai dengan standar administrasi yang berlaku. Ketepatan dan kelengkapan informasi terkait sarana untuk mencapai tujuan program, kejelasan tujuan yang ingin dicapai dan sistem informasi manajemen dan pemantauan hasil. Evaluasi model pengukuran dapat dilakukan dengan uji *convergent validity*, *discriminant validity*, dan *reliability composite*. Berikut hasil model pengukuran tersebut :



Gambar 1 Model Pengukuran

Tabel 3 Hasil Convergent Validity

Variabel	Item	Loading Factor	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	Y1	0,816	Valid
	Y2	0,804	Valid
	Y3	0,933	Valid
	Y4	0,818	Valid
Sistem Pengendalian Internal	X1.1	0,936	Valid
	X1.2	0,951	Valid
	X1.3	0,921	Valid
	X1.4	0,838	Valid
	X1.5	0,828	Valid
Sistem Informasi Akuntansi	X2.1	0,912	Valid
	X2.2	0,914	Valid
	X2.3	0,941	Valid
	X2.4	0,877	Valid
	X2.5	0,806	Valid
Pemanfaatan Teknologi Informasi	X3.1	0,730	Valid
	X3.2	0,831	Valid
	X3.3	0,830	Valid
	X3.4	0,794	Valid

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa nilai *loading factor* pada masing – masing pertanyaan lebih besar dari 0,700 sehingga dapat disimpulkan bahwa masing – masing pertanyaan untuk variabel sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan adalah valid.

Tabel 4 Hasil Discriminant Validity

Variabel	Item	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	Sistem Pengendalian Internal	Sistem Informasi Akuntansi	Pemanfaatan Teknologi Informasi
Akuntabilitas	Y1	0,816	0,769	0,721	0,355
Pengelolaan	Y2	0,804	0,666	0,885	0,309
Dana	Y3	0,933	0,809	0,897	0,559
Kelurahan	Y4	0,818	0,818	0,710	0,308
	X1.1	0,839	0,936	0,800	0,357
Sistem	X1.2	0,884	0,951	0,833	0,414
Pengendalian	X1.3	0,790	0,921	0,746	0,336
Internal	X1.4	0,695	0,838	0,677	0,146
	X1.5	0,823	0,828	0,697	0,596
	X2.1	0,865	0,797	0,912	0,226
Sistem	X2.2	0,872	0,765	0,914	0,266
Informasi	X2.3	0,895	0,827	0,941	0,320
Akuntansi	X2.4	0,788	0,692	0,877	0,123
	X2.5	0,838	0,656	0,806	0,499
Pemanfaatan	X3.1	0,253	0,156	0,109	0,730
Teknologi	X3.2	0,381	0,424	0,243	0,831
Informasi	X3.3	0,411	0,388	0,277	0,830
	X3.4	0,391	0,319	0,356	0,794

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Hasil pengujian *discriminant validity* pada tabel 4 menyajikan hasil perhitungan *cross loading*, yang menunjukkan bahwa nilai *cross loading* dari setiap indikator pada variabel sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan berada diatas ambang batas yaitu 0,500 sehingga instrumen penelitian dikatakan valid secara diskriminan.

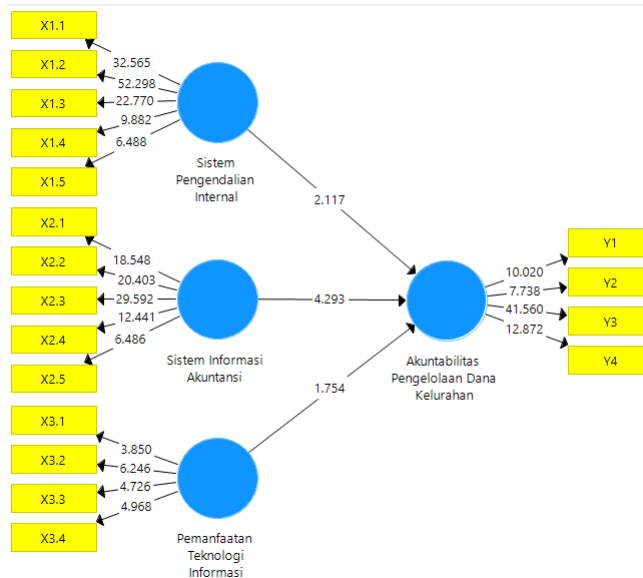
Tabel 5 Hasil Composite Reliability dan Cronbach Alpha

Variabel	Composite Reliability	Cronbach Alpha	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	0,908	0,864	Reliabel
Sistem Pengendalian Internal	0,953	0,938	Reliabel
Sistem Informasi Akuntansi	0,951	0,934	Reliabel
Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,874	0,811	Reliabel

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 5 diperoleh nilai *composite reliability* variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,908; variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,953; variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,951; dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,874;. Sedangkan nilai *cronbach's alpha* variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sebesar 0,864; variabel sistem pengendalian internal sebesar 0,938; variabel sistem informasi akuntansi sebesar 0,934; dan variabel pemanfaatan teknologi informasi sebesar 0,811;. Hal itu berarti semua variabel diatas dikatakan reliabel karena *composite reliability* dan *cronbach's alpha* lebih besar dari 0,700 sehingga maka kuesioner dapat menghasilkan hasil ukur yang stabil atau konstan.

Setelah melakukan uji outer model, maka langkah selanjutnya yaitu melakukan uji inner model. Pengujian inner model atau model structural dilakukan untuk melihat hubungan antara konstruk, nilai signifikansi dan R-square dari model penelitian.



Gambar 2 Model Struktural

Sumber : Data primer yang diolah, 2022

Tabel 6 Hasil R-Square

	R-Square	Adjusted R Square
Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	0,962	0,958

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

Berdasarkan hasil perhitungan regresi pada tabel 6 diatas, diperoleh nilai koefisien determinasi (*R Square*) adalah 0,962 yang artinya sebesar 96,2% variasi dari variabel bebas (sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi) dapat menerangkan variabel terikat (akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan), sedangkan sisanya sebesar 3,8% diterangkan oleh variabel bebas lain yang tidak diajukan dalam model penelitian ini.

Tabel 7 Uji Statistik t

	Sampel Asli	Rata-Rata Sampel	Std. Deviasi	T Statistik	P Values
Sistem Pengendalian Internal ► Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	0,277	0,304	0,131	2,113	0,035
Sistem Informasi Akuntansi ► Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	0,685	0,637	0,159	4,293	0,000
Pemanfaatan Teknologi Informasi ► Akuntabilitas Pengelolaan Dana Kelurahan	0,122	0,133	0,070	1,754	0,080

Sumber : Data primer yang diolah (2022)

1. Variabel sistem pengendalian internal memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,277 dengan nilai signifikansi sebesar 0,035. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem pengendalian internal signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan **DITERIMA**.

2. Variabel sistem informasi akuntansi memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,685 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa variabel sistem informasi akuntansi signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan **DITERIMA**.
3. Variabel pemanfaatan teknologi informasi memiliki koefisien regresi positif yaitu sebesar 0,122 dengan nilai signifikansi sebesar 0,080. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemanfaatan teknologi informasi tidak signifikan pada taraf signifikansi 5%. Dengan demikian hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan **TIDAK DITERIMA**.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Tujuan organisasi untuk memberikan kegiatan yang efektif dan efisien, kredibilitas, pelaporan keuangan, perlindungan aset negara, dan proses terintegrasi dari tindakan dan kegiatan yang dilakukan oleh manajemen (pelaksana) dan karyawannya lebih baik. Untuk mencapai melalui keamanan atau kepercayaan yang tepat. Semakin mematuhi peraturan dan undang-undang, semakin besar kewajiban untuk menjelaskan kinerja, tindakan, dan keputusan individu atau organisasi kepada orang yang bertanggung jawab.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Aziiz & Prastiti (2019), Sabriani & Rahayu (2020), dan Arfiansyah (2020) Sistem pengendalian intern pemerintah menyatakan memberikan kepercayaan yang wajar terhadap proses pengelolaan pemerintah kelurahan dalam mengelola dana kelurahan sesuai dengan undang-undang untuk memenuhi standar akuntabilitas. Pemerintah kelurahan telah menerapkan prinsip-prinsip pengendalian internal untuk mencapai tujuan secara efisien dan efektif, memastikan pelaporan pengelolaan keuangan, melindungi aset dan mendorong kepatuhan terhadap peraturan. Pengelolaan dana kelurahan dilakukan secara bertahap, dimulai dari pengelola keuangan dana kelurahan dan diakhiri dengan Lurah melalui penciptaan lingkungan pengelolaan, penilaian risiko, komunikasi yang efektif, persetujuan transaksi, pemantauan dan pemantauan.

Selain itu, berdasarkan tanggapan responden terhadap hasil penyebaran kuesioner, rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel sistem pengendalian internal. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, dan pemantauan pengendalian intern. Sedangkan rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai; dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa semakin baik para pegawai dalam menjalankan sistem pengendalian internal pada organisasi, maka akan semakin baik penerapan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana bagi kelurahan. Hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat menjadi pendukung dalam memperkuat hipotesis yang menyatakan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Hal itu berarti semakin baik sistem informasi akuntansi yang pada dasarnya lebih bersifat finansial dan mengacu pada pemrosesan transaksi organisasi yang dapat digunakan oleh pengambil keputusan untuk membuat keputusan teknis dan non-teknis, maka semakin baik kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjelaskan kinerja, tindakan dan keputusan seseorang atau organisasi kepada pihak yang berhak atas pertanggungjawaban tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Lestari & Dewi (2020) dan Dewi & Julianto (2020), Herlina et al. (2021), dan Sriwijayanti (2018) yang menyatakan bahwa akuntansi yang ada dipemerintah daerah merupakan bagian dari akuntansi sektor publik, yang mencatat dan melaporkan semua transaksi yang berkaitan dengan keuangan daerah menyediakan informasi

keuangan yang berguna untuk merencanakan dan mengelola keuangan pemerintah, dan semua aset, utang, dll dan tujuannya adalah untuk mengelola dan mempromosikan saham secara efektif dana. Sistem informasi akuntansi berperan aktif dalam mewujudkan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Adanya dampak sistem informasi akuntansi terhadap akuntabilitas keuangan daerah menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi OPD daerah dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien serta tanggung jawab pengelolaan keuangan daerah dapat diwujudkan dengan baik.

Selain itu, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel sistem informasi akuntansi. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan pengumpulan data, pemrosesan data, pengendalian dan pengamanan data, manajemen data, dan pengadaan informasi. Sedangkan rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai; dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa semakin baik para pegawai dalam menjalankan sistem informasi akuntansi pada organisasi, maka akan semakin baik penerapan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana bagi kelurahan. Hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat menjadi pendukung dalam memperkuat hipotesis yang menyatakan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa pemanfaatan teknologi informasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Oleh karena itu, hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini. Artinya, teknologi yang digunakan untuk mengolah data terus berkembang. Ini termasuk pemrosesan, pengambilan, kompilasi, penyimpanan, dan manipulasi data dalam berbagai cara untuk menciptakan informasi yang relevan, akurat, dan tepat waktu yang dibutuhkan oleh individu, bisnis, dan pemerintah. Informasi strategis untuk pengambilan keputusan tidak mempengaruhi kewajiban untuk menjelaskan atau menjelaskan kinerja, tindakan, dan keputusan individu atau organisasi kepada orang yang bertanggung jawab tersebut.

Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Pahlawan et al. (2020), Triwahyudi (2020), dan Pradana & Setiawati (2018) yang pemanfaatan teknologi informasi yang kurang optimal dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan keuangan kelurahan. Penggunaan teknologi informasi sangat penting bagi perangkat kelurahan karena dapat digunakan untuk mengolah laporan keuangan dana daerah dan untuk mengirimkan semua informasi keuangan kepada pemerintah daerah. Dengan pemanfaatan teknologi informasi yang tepat, maka pengolahan laporan keuangan dana kelurahan menjadi efisien waktu, akurat dan transparan. Selain itu, karena masih banyak aparatur yang memiliki masa kerja kurang dari 5 tahun sehingga ada indikasi kurangnya pemanfaatan dalam kemampuan mengolah laporan keuangan dana kelurahan.

Selain itu, berdasarkan jawaban responden pada hasil penyebaran kuesioner, rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atas variabel pemanfaatan teknologi informasi. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang tinggi atau cenderung setuju dengan pengolahan dan penyimpanan data keuangan; pengolahan informasi dengan jaringan internet; serta perawatan dan pemeliharaan. Sedangkan rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atas variabel akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Hal itu berarti rata-rata pegawai memberikan penilaian yang sangat tinggi atau cenderung sangat setuju dengan proses pembuatan sebuah keputusan yang dibuat secara tertulis, tersedia bagi warga dan memenuhi standar administrasi yang berlaku; akurasi dan kelengkapan informasi yang berhubungan dengan cara-cara mencapai sasaran suatu program; kejelasan dari tujuan yang ingin dicapai; dan sistem informasi manajemen dan monitoring hasil. Oleh karena itu, dapat diindikasikan bahwa optimal atau tidaknya para pegawai dalam memanfaatkan teknologi informasi, maka tidak akan mempengaruhi penerapan akuntabilitas dalam hal pengelolaan dana bagi kelurahan. Hasil penyebaran kuesioner tersebut dapat menjadi pendukung dalam memperkuat hipotesis yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris pengaruh sistem pengendalian internal, sistem informasi akuntansi, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan. Objek dalam penelitian ini adalah 6 (enam) Kelurahan pada Kecamatan Gubeng Kota Surabaya dengan jumlah pegawai yang dapat dijadikan sebagai responden sebanyak 30 pegawai. Berdasarkan analisis data dan pembahasan sebelumnya, maka didapatkan kesimpulan bahwa sistem pengendalian internal secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Sistem informasi akuntansi secara statistik berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga hasil ini sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian. Serta pemanfaatan teknologi informasi secara statistik tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana kelurahan sehingga hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis yang diajukan dalam penelitian.

Implikasi yang dapat digunakan untuk penelitian-penelitian selanjutnya adalah dapat dilakukan pendampingan seperti memberikan pengarahan atau petunjuk dalam pengisian kuesioner oleh responden untuk meminimalisir ketidakpahaman responden mengenai pernyataan kuesioner yang diberikan sehingga hasil kuesioner yang didapatkan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., & Hartono, J. (2015). *Partial Least Square (PLS): Alternative structural equation modeling (SEM) in business research*. Penerbit Andi.
- Arfiansyah, M. A. (2020). Pengaruh sistem keuangan desa dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *JIFA (Journal of Islamic Finance and Accounting)*, 3(1).
- Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Aktual*, 6(2), 280–344.
- Dewi, P. A. D. R., & Julianto, I. P. (2020). Pengaruh penerapan sistem informasi keuangan desa dan pengendalian internal terhadap akuntabilitas dana desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(2), 281–292.
- Herlina, R., Taufik, T., & Nasir, A. (2021). Pengaruh transparansi, kompetensi, dan sistem akuntansi keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dengan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah sebagai variabel moderasi. *COSTING: Journal of Economic, Business and Accounting*, 4(2), 419–433.
- Indraswari, N. E., & Rahayu, Y. (2021). Pengaruh kompetensi pemerintah desa, partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi (JIRA)*, 10(4).
- Lestari, N. L. W. T., & Dewi, N. N. S. R. T. (2020). Pengaruh pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas laporan keuangan. *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 11(2), 170–178.
- Martini, R., Lianto, N., Hartati, S., Zulkifli, Z., & Widyastuti, E. (2019). Sistem pengendalian intern pemerintah atas akuntabilitas pengelolaan keuangan dana desa di Kecamatan Sembawa. *Jurnal Akademi Akuntansi*, 2(1).
- Musdalifah, M. (2020). *Pengaruh peran perangkat desa, aksesibilitas laporan keuangan dan sistem akuntansi keuangan desa terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Temon*. Bachelor thesis. Universitas Ahmad Dahlan.
- Pahlawan, E. W., Wijayanti, A., & Suhendro, S. (2020). Pengaruh kompetensi aparatur desa, sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi dan partisipasi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *Indonesia Accounting Journal*, 2(2), 162–172.

- Pradana, A. A. P., & Setiawati, E. (2018). Pengaruh kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah (Studi Pada Dinas Kabupaten Boyolali). *Seminar Nasional Dan Call for Paper III Fakultas Ekonomi*, 1–13.
- Rahadi, D. R. (2017). Perilaku pengguna dan informasi hoax di media sosial. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, 5(1), 58–70.
- Rezkiyanti, Y. (2019). Pengaruh sistem pengendalian internal, pemanfaatan teknologi informasi, dan kompetensi perangkat desa terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. *AKMEN Jurnal Ilmiah*, 16(1).
- Sabriani, A. A., & Rahayu, S. (2020). Pengaruh penyajian laporan keuangan dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. *JAE (Jurnal Akuntansi Dan Ekonomi)*, 5(2), 14–23.
- Sari, M. S., & Zefri, M. (2019). Pengaruh akuntabilitas, pengetahuan, dan pengalaman pegawai negeri sipil beserta kelompok masyarakat (pokmas) terhadap kualitas pengelola dana kelurahan di lingkungan Kecamatan Langkapura. *Jurnal Ekonomi*, 21(3), 308–315.
- Sriwijayanti, H. (2018). Analisis pengaruh transparansi, akuntabilitas dan pemanfaatan sistem informasi akuntansi keuangan daerah terhadap pengelolaan APBD. *Jurnal EKOBISTEK Fakultas Ekonomi*, 7(1), 88.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Triwahyudi, A. (2020). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap kualitas laporan keuangan yang berimplikasi pada pencegahan fraud pada kementerian koperasi dan usaha kecil dan menengah. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2–39.
- Wahyuni, S., Indrawati, N., & Al Azhar, A. (2018). Pengaruh sistem pengendalian intern, sistem informasi akuntansi, dan kompetensi aparat terhadap akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa: Studi empiris desa-desa di Kabupaten Rokan Hulu. *Jurnal Ekonomi*, 26(3), 98–110.